

GAMBARAN ANALISIS PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Alvian Dicky Irawan

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

alvian.dicky@ui.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan nasional secara optimal dapat tercapai apabila pembangunan kesehatan dapat terwujud. Hubungan keduanya sangat jelas dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena masyarakat yang sehat dapat memiliki pendidikan yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendapatan dan tabungan yang lebih baik, perilaku dan kondisi hidup yang lebih sehat, serta stabilitas sosial yang lebih stabil. Pembangunan kesehatan di Indonesia harus menjadi prioritas agar pembangunan nasional berhasil. Pembangunan nasional yang tidak memperhatikan pembangunan kesehatan, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan nasional yang memperhatikan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan di Indonesia yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024 menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kondisi kesehatan masyarakat, terlebih lagi saat masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pembangunan kesehatan di Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 pada masa pandemi Covid-19. Manuskrip ini disusun dengan menggunakan metode penelitian studi literatur (*literature review*) dengan mengumpulkan data dari berbagai artikel jurnal, *textbook*, *website* dan regulasi terkait pembangunan kesehatan di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi Covid-19 telah berdampak parah pada semua bidang kehidupan, salah satunya bidang kesehatan. Kehadiran pandemi Covid-19 meningkatkan risiko masalah kesehatan yang ada, sebab tertundanya pelaksanaan pencapaian target dalam pembangunan kesehatan di Indonesia seperti masalah kesehatan ibu dan anak, masalah gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penguatan sistem kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan rencana pendukung agar RPJMN 2020-2024 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Kata kunci : Covid-19, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Nasional

ABSTRACT

Optimal national development can be achieved if health development can be realized. The relationship between two is very clear in the implementation of national development because healthy people can have better education, higher labor productivity, better income and savings, healthier behavior and living conditions, and more stable social stability. Health development in Indonesia must be a priority for successful national development. National development that doesn't pay attention to health development has lower success rate than national development that pays attention to health. In its implementation, health development in Indonesia contained in the RPJMN 2020-2024 faces various challenges that can threaten public health conditions, especially during Covid-19 pandemic. This study aims to determine the description of health development in Indonesia in the RPJMN 2020-2024 during Covid-19 pandemic. This manuscript was prepared using the literature review research method by collecting data from various journal articles, textbooks, websites and regulations related to health development in Indonesia during Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic situation has had a severe impact on all areas of life, one of which is the health sector. The presence of Covid-19 pandemic increases the risk of existing health problems, due to delays in achieving targets in health development in Indonesia, such as maternal and child health problems, community nutrition problems, disease prevention and control, and strengthening the health system. Therefore, a supporting plan is needed so that the RPJMN 2020-2024 can run according to the planned objectives.

Keywords : Covid-19, Health Development, National Development

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Handoko (dalam Muhyiddin dan Hadi, 2020) menegaskan bahwa cita-cita nasional sendiri dapat diwujudkan melalui serangkaian pembangunan nasional yang terencana, berkesinambungan serta terkoordinasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dengan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan kesehatan berbasis pembangunan nasional memerlukan perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat (Nopiani, 2019).

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU 36 tahun 2009). Pembangunan kesehatan juga dimuat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 lampiran I dimana arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju jaminan kesehatan semesta, terutama melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) yang dilaksanakan dan didukung dengan peningkatan upaya promotif dan upaya preventif. Mengatasi pencegahan melalui inovasi dan penggunaan teknologi di sektor kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah ketika merencanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik sektor nasional maupun sektor kesehatan. Yang mana desainnya didasarkan pada isu-isu inti kesehatan masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 meningkatkan risiko masalah kesehatan yang ada, sebab tertundanya pelaksanaan pencapaian target dalam pembangunan kesehatan di Indonesia seperti masalah kesehatan ibu dan anak, masalah gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penguatan sistem kesehatan. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk memitigasi dampak Covid-19 yang dapat dilihat dari pengalaman beberapa negara seperti menguatkan sektor kesehatan, melindungi masyarakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan dan program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19. (Rahmawati, 2020).

Situasi pandemi Covid-19 telah berdampak parah khususnya bidang kesehatan. Kehadiran pandemi Covid-19 meningkatkan risiko masalah kesehatan yang ada, sebab tertundanya pelaksanaan pencapaian target dalam pembangunan kesehatan di Indonesia seperti masalah kesehatan ibu dan anak, masalah gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penguatan sistem kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terkait pelaksanaan RPJMN 2020-2024 di masa pandemi dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan tujuan agar kedepannya pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terwujud sepenuhnya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *literature review* (studi literatur). Dimana dalam studi literatur ini, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa artikel jurnal, *textbook*, dan regulasi terkait pembangunan kesehatan di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Terdapat 2 artikel jurnal untuk di analisis.

HASIL

Pembangunan Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19

Selama ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan kesehatan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi yaitu adanya bonus demografi. Hal ini berimplikasi pada peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), serta balita gizi buruk. Sejak saat itu, penyakit menular masih merajalela dan penyakit tidak menular mulai meningkat secara signifikan, menciptakan beban penyakit ganda di Indonesia. Beberapa penyakit menular seperti TBC, bahkan munculnya penyakit menular baru seperti Covid-19 yang menjadi ancaman besar bagi pembangunan kesehatan Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Covid-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. WHO pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus 'virus pneumonia' di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (WHO, 2022). Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Pada 14 Agustus 2022, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 4.442 menjadi 6.282.774, pasien sembuh sebanyak 6.072.421, dan meninggal sebanyak 157.226 (PHEOC Kemkes RI, 2022).

Implementasi RPJMN 2020-2024 dalam Pembangunan Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Pembangunan nasional pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu pembangunan kesehatan juga termasuk di dalamnya. Kebijakan kesehatan disusun oleh pemerintah dalam rangka pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyesuaikan program yang telah ada untuk menjaga kesehatan masyarakat. Penyesuaian telah dilakukan pada program pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Indonesia telah menerapkan karantina wilayah yang disebut dengan Pembatasan Sosial Besar-besaran atau PSBB. Penilaian tingkat keparahan wabah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Peraturan Pelaksanaan PSBB tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain PP Nomor 21 Tahun 2020, aturan PSBB diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 (Muhyiddin, 2020). Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk memajukan pembangunan negara, salah satunya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan membuat langkah-langkah konkrit pemerintah lebih terstruktur. Penyesuaian ini dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 untuk mengoreksi sasaran pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 (Hadi & Muhyiddin, 2020).

PEMBAHASAN

Sepanjang tahun 2020, pandemi Covid-19 telah menjadi fokus utama di seluruh dunia. Semua negara, termasuk Indonesia, saat ini sedang berjuang untuk mengendalikan penyakit tersebut. Sejak Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah, termasuk di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan menjadi paling terdampak. Tambahan kasus positif di Indonesia juga harus ditanggung oleh meninggalnya beberapa tenaga kesehatan sebagai garda perlindungan kesehatan terdepan. Selain itu, pandemi juga menyebabkan kendala terhadap ketersediaan peralatan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar. Contoh terkait penyediaan alat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan antara lain kurangnya masker medis di masyarakat dan kekhawatiran masyarakat terhadap kunjungan ke petugas kesehatan sehingga pelayanan medis yang diberikan tidak optimal (Afrianto, 2020).

Pandemi telah membawa perubahan besar di hampir semua sektor, sehingga pemerintah telah meluncurkan versi revisi RPJMN 2020-2024 dengan konten yang disesuaikan dengan pandemi Covid-19 saat ini. Dan bahkan perencanaan ke depan setelah penyakit Covid-19 sembuh. Terutama pada bidang kesehatan, rencana difokuskan pada penanganan segera terhadap Covid-19 dan pelaksanaan reformasi baru sistem kesehatan nasional pada tahun 2024. Rudiyanto (2020) menjabarkan bahwa, reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu memperkuat sistem kesehatan untuk memperkuat sistem menuju kesiapan menghadapi pandemi dan PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*), menguatkan *recovery* pasca Covid-19 dan pengendalian masalah kesehatan (TB, Malaria, AKI dan AKB, dan lain-lain), penguatan promotif dan preventif, serta peningkatan anggaran kesehatan oleh pemerintah. Sementara untuk fokus pada penguatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, RPJMN terfokus pada tiga elemen antara lain penguatan GERMAS (preventif dan promotif), penguatan *health security* dengan memanfaatkan kemampuan untuk *prevent, detect, response*, serta penguatan sumber daya kesehatan.

Konsep reformasi kesehatan yang dikembangkan Bappenas masih dalam tahap konseptual, namun telah menjadi proyek besar (*major project*) baru di RKP 2021. Reformasi ini dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia serta memastikan tercapainya target kinerja RPJMN 2020-2024 secara tepat waktu berdasarkan pendekatan kelembagaan, regulasi, dan pendanaan (Bappenas, 2020). Pada intinya, reformasi sistem kesehatan tidak mengubah sistem kesehatan yang ada, tetapi berfokus pada reformasi setiap subsistem kesehatan yang diuraikan dalam delapan bidang area reformasi dan rencana strategis utama, yaitu: pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat (Rahmawati, 2020).

KESIMPULAN

Situasi pandemi COVID-19 telah berdampak parah pada semua bidang kehidupan, salah satunya bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan yang termasuk dalam RPJMN 2020-2024 perkembangannya terhambat oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan rencana dukungan agar RPJMN 2020-2024 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Koordinasi ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2020-2024. Reformasi yang dilaksanakan Bappenas bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia dan memungkinkannya memenuhi target kinerja RPJMN 2020-2024 tepat waktu. Reformasi kesehatan ini dilakukan bukan untuk mengubah sistem yang ada, tetapi untuk mengoptimalkan subsistem yang ada dan mengembangkannya lebih lanjut di delapan bidang reformasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. drg. Wahyu Sulistiadi M.A.R.S. selaku dosen mata kuliah Sistem Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan manuskrip ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, D.E.D.Y. (2020). Pandemi: Dari Kesehatan, Ekonomi, Hingga Politik. Kompasiana, p. doi.
- Bappenas RI. (2020). Paparan Pungkas Bahjuri Ali Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas RI, 2020 dalam Webinar Sistem Kesehatan Nasional 19 Agustus 2020. Konsep Reformasi Kesehatan dan 8 Area Reformasi.
- Hadi, S. & Muhyiddin, M (2020). Sinergi Prioritas Program Kerja Pemerintah 2020-2024 dengan Kerangka Ketahanan Nasional dalam Penanganan Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), pp.127-136.
- Indonesia, P.R. (2020). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta.
- Indonesia, P.R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), pp.240-252.
- Nopiani, N. (2019). Implementasi Program Pembangunan Dibidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), pp.130-134.
- PHEOC Kemkes RI. (2022). Infeksi Emerging Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Rahmawati, T. (2020). Pengarusutamaan Konsep Reformasi Sistem Kesehatan dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. *Majalah Media Perencana*, 1(1), pp.82-96.
- Rudiyanto, A. (2020). Materi Ceramah Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Lemhannas RI.
- World Health Organization. (2022). Health Topics: Coronavirus Disease (COVID-19). Geneva: World Health Organization.